

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan (*truth atau faith*). Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan<sup>1</sup>. Pengertian kredit menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>2</sup>.

Pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit dan sistem pengendalian kredit, pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Pemberian kredit mutlak dilakukan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitor bersangkutan<sup>3</sup>.

Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari kegiatan saling tolong menolong atau kerjasama dengan orang lain, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa menghindarkan diri dari kehidupan bermasyarakat dalam

---

<sup>1</sup> Thamrin Abdullah, dan Farnis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali pers, 2012) Ed-1 Cet-1, h 162, Lihat juga di buku Kasmir, 2004, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.102

<sup>2</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Edisi Revisi ke-9, h. 73

<sup>3</sup> Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), Cet ke-4. h 115



masyarakat yang mendapatkan pembiayaan/pinjaman ini bisa mendirikan sebuah usaha yang bisa menopang kebutuhan sehari-harinya.

PNPM-Mandiri Perdesaan adalah program pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat<sup>4</sup>.

Program pengentasan kemiskinan harus benar-benar diarahkan langsung kepada masyarakat miskin, bukan birokrasi (sistem pemerintahan jenjang jabatan) salah satu yang efektif adalah melalui pembiayaan kredit mikro atau pinjaman lunak<sup>5</sup>.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri telah memberikan dampak positif di berbagai bidang, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri telah banyak fasilitas sarana dan prasarana umum yang dibangun, tersedianya sumber keuangan melalui dana bergulir dan kredit

---

<sup>4</sup> Dokumentasi PNPM-Mandiri Perdesaan ( Petunjuk Teknis Operasional) Tahun 2011

<sup>5</sup> Soetanto Hadinoto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), h.

mikro untuk mengembangkan ekonomi rumah tangga dan usaha kecil dan memberikan akses khusus bagi kaum perempuan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia<sup>6</sup>.

Sarana yang akan dicapai kegiatan ini adalah meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dikemas dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri, karena program ini menuntut untuk menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam setiap tahapan kegiatan.

Provinsi Riau di tahun anggaran 2013 ini memberikan dukungan lebih terhadap alokasi DDUB (Dana Daerah Urusan Bersama) yang bersumber dari APBD untuk program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan<sup>7</sup>. Kabupaten Penyumbang terbesar DDUB ini adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp15 Miliar dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 12 Miliar. Sehingga, untuk masing-masing Kecamatan pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di dua Kabupaten ini juga mengalami peningkatan yang cukup drastis. Peningkatannya yaitu dana PNPM bisa membantu perekonomian masyarakat serta infrastruktur yang memadai.

Anggaran Tahun 2013 dana hibah yang diperoleh dari APBD dan APBN Kecamatan Merbau seluruh dana dialokasikan untuk kegiatan non simpan pinjam yaitu seluruhnya untuk kegiatan infrastruktur serta sarana prasarana lainnya, seperti halnya untuk pembuatan rabat beton, perbaikan jalan-jalan yang sudah rusak, pembuatan fasilitas pendidikan seperti gedung Taman Pendidikan Kanak-

---

<sup>6</sup> Zainal Fitriadi, Sekretaris UPK PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Merbau, *Wawancara* 20 Januari 2014

<sup>7</sup> <http://www.pnpm-perdesaan.or.id/?page=news&topic=Pembangunan&id=224>, diakses pada tanggal 25 November 2013

kanak (TK) dan perbaikan mushalla yang ada didesa, selain itu dana juga digunakan untuk kegiatan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Untuk simpan pinjam PNPM mandiri kecamatan Merbau menggunakan asetnya sendiri<sup>8</sup>, yang mana untuk laporan perdesember diperoleh data untuk simpan pinjam yaitu dana yang dialokasikan untuk simpan pinjam sebesar Rp. 829.000.00,00 dan penunggakannya sebesar 150.928,100 atau sekitar 18% dari seluruh dana yang telah dialokasikan.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan telah menggunakan Standar Operasional Program (SOP), namun dalam praktiknya masih banyak terdapat kendala-kendala, antara lain tidak tercapainya target yang telah di buat oleh pengurus beserta jajarannya. Penyaluran kredit juga merupakan salah satu dari kendala operasional PNPM-Mandiri Perdesaan itu, karena sebagian masyarakat yang menjadi nasabah PNPM-Mandiri Perdesaan di Kecamatan menunggak membayar angsuran pinjaman yang telah ditetapkan oleh PNPM-Mandiri Perdesaan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“KREDIT MACET DAN LANGKAH PENANGGULANGANNYA PADA DANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)-MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (SUATU TINJAUAN EKONOMI ISLAM)”**.

---

<sup>8</sup> Khozinuddin, S.Pd.I, Ketua UPK PNPM-MPD Kecamatan Merbau, *Wawancara* Via telfon 25 September 2013

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan agar lebih mudah dipahami maka penulis membatasi tulisan ini hanya pada Kredit Macet dan Langkah Penanggulangannya periode 2013 Pada Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada dana PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Bagaimana langkah penanggulangan kredit macet pada dana PNPM-Mandiri Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap kredit macet serta langkah-langkah penggulungannya pada dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Perdesaan Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kredit macet pada dana PNPM-Mandiri Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

- b. Untuk mengetahui langkah penanggulangan kredit macet yang dilakukan oleh manajemen pada dana PNPM-Mandiri Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti
- c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap kredit macet serta langkah penggulungannya pada dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Perdesaan Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?

## **2. Manfaat penelitian**

- a. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang program pemerintah yaitu PNPM-Mandiri.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengurus PNPM-Mandiri dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan penulis mengambil lokasi ini adalah karena di Kecamatan Merbau terdapat banyak keluhan dari para ketua kelompok di perdesaan mengenai penunggakan pembayaran pinjaman oleh anggota peminjam.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus PNPM-Mandiri Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti serta nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran pinjaman, dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kredit Macet Dan Langkah Penggulungannya Pada Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus Unit kegiatan Pengelola (UPK) PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Merbau yang berjumlah 4 orang dan kelompok nasabah yang meminjam dana PNPM-Mandiri Kecamatan Merbau yang berjumlah 95 kelompok. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel yang memilih orang-orang yang terseleksi oleh peneliti berpengalaman berdasarkan ciri-ciri khusus yang memiliki sampel tersebut yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya<sup>9</sup>, yakni dengan sampel sebanyak 25 kelompok bermasalah dan 1 orang pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dan dikelola sendiri oleh penulis. Dalam hal ini berupa data hasil wawancara dan kuisioner yang penulis lakukan dengan responden.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>9</sup>Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta:Rajawali Pers, 2008) Ed 1 h.

Yaitu data pendukung dalam penelitian ini, yang diperoleh dari berbagai instansi terkait, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam mengumpulkan data-data dan fakta di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa teknis antara lain:

- a. Wawancara, yaitu penulis secara langsung melakukan wawancara langsung dengan pengurus PNPM- Mandiri Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Angket, metode pengumpulan data melalui pertanyaan yang disebarakan kepada responden.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melihat arsip laporan kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Merbau.

#### 6. Metode Analisa Data

Metode penulisan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data *deskriptif kualitatif*, yaitu analisa data terhadap data-data yang diperoleh terkumpul dengan cara menyusun dalam bentuk-bentuk tabel dan presentase, kemudian diinterpretasikan sehingga diperoleh kesimpulan dari data-data tersebut.

#### 7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data-data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisis.

- b. Induktif, yaitu mencari data yang khusus untuk menarik kesimpulan secara umum.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menerangkan tentang Profil Kecamatan Merbau yang meliputi sejarah singkat kecamatan Merbau, Letak Geografis dan demografis, PNPM-Mandiri Perdesaan, sejarah singkat PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Merbau, Visi dan Misi, Tujuan, Prinsip Dasar, Struktur Organisasi serta tugas, wewenang dan tanggungjawab pelaku-pelaku PNPM-Mandiri Perdesaan.

### **BAB III : TINJAUAN LITERATUR**

Bab ini menerangkan tinjauan pustaka yang terdiri dari: pengertian kredit dan kredit macet, jenis-jenis kredit, tujuan dan fungsi kredit, Unsur-unsur kredit, penilaian atau analisis pemberian kredit serta upaya penyelesaian kredit macet. Pandangan Kredit Dalam Islam, Pengertian Pinjam Meminjam serta landasan syara' tentang Pinjam Meminjam.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasannya yang terdiri dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet dan langkah penanggulangannya pada dana PNPM-Mandiri di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti serta tinjauan ekonomi islam terhadap permasalahan tersebut.

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan uraian yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang menyangkut tentang bab-bab sebelumnya.